

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian *Gross Domestic Product* (GDP) dan GDP per kapita

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah *Gross Domestic Product* (GDP). Selain itu, GDP juga mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya(Mankiw,2006:5,6,22,23).

Produk Domestik Bruto atau GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena GDP mengukur dua hal pada saat bersamaan : total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran(Mankiw,2006:5).

Kita dapat menghitung GDP perekonomian dengan menggunakan salah satu dari dua cara : menambahkan semua pengeluaran rumah tangga atau menambahkan semua pendapatan (upah, sewa dan keuntungan) yang dibayar perusahaan. Namun, dalam hal ini yang terpenting adalah tahu mengenai fungsi GDP dalam perekonomian, apa yang dapat diukur dan yang tidak, komponen dan jenis serta hubungan GDP dengan kesejahteraan.

Dalam hal pengukuran, GDP mencoba menjadi ukuran yang meliputi banyak hal, termasuk di dalamnya adalah barang – barang yang diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara legal di pasaran. GDP juga memasukkan nilai pasar dari jasa perumahan pada perekonomian. GDP meliputi barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian, mobil) maupun jasa yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan rumah, kunjungan ke dokter). GDP mengikutsertakan barang dan jasa yang sedang diproduksi. GDP mengukur nilai produksi dalam batas geografis sebuah negara. GDP mengukur nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu interval waktu.

Biasanya, interval tersebut adalah setahun atau satu kuartal (tiga bulan). GDP mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama interval tersebut. Sedangkan hal – hal yang tidak dapat diukur oleh GDP yaitu GDP mengecualikan banyak barang yang diproduksi dan dijual secara gelap, seperti obat – obatan terlarang. GDP juga tidak mencakup barang – barang yang tidak pernah memasuki pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga (Mankiw, 2006:7-10).

Setelah mengetahui apa yang dapat dan tidak diukur dengan GDP, selanjutnya kita harus mengetahui komponen – komponen dari GDP. GDP (yang ditunjukkan sebagai Y) dibagi atas empat komponen : konsumsi (C), investasi (I), belanja negara (G), dan ekspor neto (NX):

$$Y = C + I + G + NX$$

Persamaan ini merupakan persamaan identitas – sebuah persamaan yang pasti benar dilihat dari bagaimana variabel - variabel persamaan tersebut dijabarkan. Komponen tersebut ialah :

1. Konsumsi (*consumption*) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga.
2. Investasi (*investment*) adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa
3. Belanja pemerintah (*government purchases*) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat (federal).
4. Ekspor neto (*net exports*) sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga negara (impor)

(Mankiw,2006:11-13).

Berikutnya, ketika kita mempelajari perubahan perekonomian seiring berlalunya waktu, ekonom ingin memisahkan dua pengaruh (perekonomian menghasilkan output barang dan jasa dengan lebih banyak dan barang dan jasa dijual pada harga yang lebih tinggi). Khususnya, mereka ingin suatu ukuran jumlah barang dan jasa keseluruhan yang diproduksi perekonomian yang tidak terpengaruh perubahan harga barang dan jasa tersebut (Mankiw,2006:14). Untuk mendapatkan ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, kita menggunakan GDP riil (*real GDP*) yang menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. GDP riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena GDP riil tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan GDP riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, GDP riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian(Mankiw,2006:15-16).

Selain GDP riil, alat ukur yang lain yaitu GDP nominal. GDP nominal mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga – harga di masa sekarang. GDP nominal dalam perhitungannya dipengaruhi kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan juga kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Dari kedua statistika ini kita dapat mengetahui statistika yang ketiga , deflator GDP, yang mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang diproduksi. Deflator GDP mengukur tingkat harga – harga saat ini relatif terhadap tingkat harga – harga di tahun pokok. Deflator GDP merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para

ekonom untuk mengamati rata – rata tingkat harga dalam perekonomian(Mankiw,2006:17).

Pada bahasan yang terakhir, yaitu hubungan GDP dengan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut. GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata – rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata – rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, namun di belakang rata – rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang – orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan(Mankiw,2006:19-22).

2.2.Sumber Pembiayaan Pembangunan dari FDI (*Foreign Direct Investment*) dan Hutang Luar Negeri

Pertumbuhan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) yang dilakukan oleh pihak swasta yakni, yang dana – dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat – alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik – pabrik, mendatangkan mesin – mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya di negara dunia ketiga telah

berlangsung sangat cepat beberapa dasawarsa terakhir. Namun sayangnya perhatian negara penanam modal hanya tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil atas setiap sen modal yang mereka tanamkan. Itulah sebabnya mengapa lebih dari 90 persen dana investasi asing swasta selama ini mengalir ke negara – negara industri maju dan sebagian negara – negara berkembang yang perekonomiannya paling dinamis dan pertumbuhannya relatif pesat (Todaro,2004:165-167). Di negara berkembang seperti Indonesia (sampai sebelum terjadi krisis Asia pada tahun 1997), Indonesia dipandang oleh banyak pengamat sebagai suatu contoh istimewa dari “mukjizat” perekonomian Asia. Sebagai salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya tercepat di dunia, negara ini telah menarik sejumlah besar investasi modal asing swasta dan negara ini juga merupakan kesayangan dari komunitas pemberi bantuan bilateral (terutama Amerika Serikat dan Jepang) serta multilateral (Todaro,2004:203). Penanaman modal asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia memiliki dampak yang sesuai dengan analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan (faktor – faktor penentu) pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan dapat mencapai target – target pertumbuhan dan pembangunan. Teori ini sejalan dengan analisis “kesenjangan tabungan - investasi”

(*savings – investment gap*) yang dikatakan bisa teratasai oleh adanya penanaman modal asing yang biasa disebut model pertumbuhan *Harrod – Domar* yang mengungkapkan hubungan langsung antara tingkat tabungan neto suatu negara, yakni s , dengan tingkat pertumbuhan outputnya, g , melalui persamaan $g = s/k$; adapun k adalah rasio modal – output (Todaro,2004:170-171).

Terdapat 4 hal yang merupakan sumbangan positif penanaman modal swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara penerimanya (pertumbuhan GDP) yaitu :

1. Peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan (diinginkan) dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan.
2. Peranannya mengisi kesenjangan target jumlah devisa yang dibutuhkan dan jumlah aktual devisa dari pendapatan ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto (*trade gap*).
3. Peranannya mengisi kesenjangan target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan.
4. Peranannya mengisi kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewiraswastaan, teknologi produksi, dan keterampilan kerja yang diharapkan dapat beroperasi di negara – negara berkembang yang bersangkutan (Todaro,2004:171-172).

Selain penanaman modal swasta asing (*Foreign Direct Investment*), salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia bersumber pada bantuan

luar negeri yang salah satunya berwujud hutang luar negeri. Bantuan luar negeri dapat berupa bantuan resmi pembangunan yang bersifat bilateral maupun multilateral serta bantuan tidak resmi yang disediakan oleh LSM. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara ke negara lain dapat dikatakan sebagai bantuan luar negeri.

Sejalan dengan itu, para ekonom kemudian mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap arus permodalan ke negara – negara berkembang yang harus memenuhi dua kriteria pokok, yakni :

1. tujuan si pemilik dana dalam memberikan dana tersebut tidak bersifat komersial,
2. mengandung syarat –syarat konsesional (*concessional terms*), yang meliputi, suku bunga dan periode pengembalian bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak (bunganya lebih rendah, dan masa pengembaliannya lebih lama) daripada syarat – syarat komersial pada umumnya.

Bahkan definisi ini pun masih diliputi suatu kerancuan, karena hal itu bisa meliputi bantuan militer (*military aid*), yang juga bersifat konsesional dan tidak komersial. Dengan demikian, konsep bantuan luar negeri yang kini dipergunakan dan diterima secara luas mengacu pada seluruh pinjaman konsesional serta hibah resmi, baik itu dalam bentuk uang tunai maupun bentuk – bentuk aktiva lainnya, yang secara umum ditujukan untuk dapat mengalihkan sejumlah sumber daya dari dari negara – negara maju ke negara – negara berkembang bagi kepentingan pembangunan atau dengan maksud distribusi pendapatan (Todaro,2004:184).

Berikut ini adalah ulasan tentang argumen – argumen ekonomis utama yang paling sering diajukan untuk mendukung pemberian bantuan luar negeri :

1. Kendala keterbatasan devisa yang berkaitan dengan analisis bantuan luar negeri "dua kesenjangan". Argumen inti model dua kesenjangan (*two – gap model*) ini mengatakan bahwa negara – negara berkembang pada umumnya menghadapi kendala berupa keterbatasan tabungan domestik yang jauh dari mencukupi untuk menggarap segenap peluang investasi yang ada, serta kelangkaan devisa yang tidak memungkinkannya mengimpor barang – barang modal dan barang antara yang penting bagi usaha pembangunannya. Secara matematis, model dua kesenjangan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Kesenjangan atau kendala tabungan. Persamaannya yaitu :

$$I < F + S_y$$

di mana :

F = jumlah arus pemasukan modal

sY = tabungan domestik

I = investasi domestik

- b. Kesenjangan atau kendala devisa. Persamaannya yaitu :

$$(m_1 - m_2)I + m_2Y - E \leq F$$

di mana :

E = tingkat ekspor eksogen

F = faktor kritis dalam analisis

I = tingkat investasi

m_1 = *marginal impor share*

m_2 = parameter

Y = nilai secara eksogen

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan. Bantuan luar negeri juga dianggap dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan, karena bantuan luar negeri dapat secara seketika meningkatkan persediaan tabungan domestik sebagai hasil dari meningkatnya laju pertumbuhan yang memang ingin diraih.
3. Bantuan Teknis. Bantuan keuangan perlu dilengkapi dengan bantuan teknis (*technical assistance*) dalam bentuk pengalihan tenaga kerja yang berkeahlian tinggi untuk menjamin bahwa dana bantuan tersebut benar – benar digunakan secara efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Kapasitas Absorptif yang didefinisikan sebagai kemampuan negara penerima bantuan untuk dapat menggunakan bantuan tersebut secara bijaksana dan produktif (Todaro,2004:192-195).

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peningkatan bantuan tentu saja tetap lebih baik dari pengurangan bantuan. Dari sudut pandang dan kepentingan negara – negara berkembang, dari mana pun sumber dan besarnya bantuan, semakin banyak bantuan yang berbentuk hibah atau pinjaman konsesional, tidak dikaitkannya bantuan dengan ekspor negara - negara donor, semakin besarnya otonomi yang didapat dalam pemanfaatan bantuan tersebut dan semakin dikurangnya tariff dan hambatan nontarif di negara – negara donor atas barang – barang ekspor negara – negara dunia ketiga, maka akan semakin besar pula dampak positif dari

bantuan luar negeri tersebut terhadap usaha pembangunan mereka. Oleh karena itu, kesadaran akan adanya kepentingan bersama mungkin satu – satunya titik tolak harapan untuk membangun suatu “tata ekonomi internasional baru”, di mana bantuan luar negeri dan penanaman modal asing benar – benar dapat memberikan sumbangan – sumbangan yang riil dan permanen bagi pembangunan negara – negara Dunia Ketiga (Todaro,2004:201-202).

2.3.Pengaruh Kurs terhadap GDP (*Gross Domestic Product*)

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar mata uang (*exchange rate*). Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel – variabel makroekonomi lainnya. Oleh karena itu, kurs yakni harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, juga merupakan harga aktiva atau harga asset (*asset price*), sehingga prinsip – prinsip pengaturan harga asset – asset lainnya juga berlaku dalam pengaturan kurs. Kurs dapat berubah – ubah secara mendadak, sesuai dengan berita – berita, atau bahkan desas – desus yang seringkali tidak jelas asal – usulnya, yang beredar mengenai nilai mata uang – mata uang tersebut di masa yang akan datang. Setiap negara memiliki sebuah mata uang yang menunjukkan atau menetapkan harga – harga dari setiap barang dan jasa yang ada (Salvatore,1997:10).

Kurs juga dapat didefinisikan sebagai harga 1 unit mata uang domestik dalam satuan valuta asing. Dalam dunia nyata, definisi kurs itu pula yang sering digunakan, yakni kurs menyatakan harga valuta asing dalam satuan mata uang domestik. Selain

definisi kurs, hal yang perlu untuk dibahas adalah teori yang menjelaskan proses pembentukan kurs. Terdapat tiga teori yang akan dibahas yaitu :

1. Teori Paritas Daya Beli. Terdapat dua versi yaitu versi absolut dan versi relatif yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Versi absolut dari teori PPP mempostulasikan atau merumuskan gejala bahwa kurs antara dua mata uang adalah identik dengan rasio dari tingkat harga umum dari kedua negara yang bersangkutan. Secara garis besar, teori ini menyatakan : Pasar valuta asing berada dalam kondisi keseimbangan apabila semua deposito / simpanan dalam berbagai valuta asing menawarkan tingkat imbalan yang sama. Adapun kondisi di mana perkiraan tingkat imbalan yang ditawarkan semua simpanan dalam berbagai valuta asing sama (bila dihitung dengan satu satuan mata uang yang sama) disebut sebagai kondisi paritas suku bunga (*interest parity*). Artinya, segenap simpanan valuta asing menawarkan tingkat imbalan, resiko kurs, dan kemungkinan perubahan kurs yang secara keseluruhan setara sehingga prospek keuntungan ataupun daya tarik atas asset – asset tersebut sama besarnya. Hanya apabila tingkat imbalan yang ditawarkan semua simpanan sama (atau dengan adanya kondisi paritas suku bunga) pasar tidak akan mengalami kelebihan penawaran simpanan tertentu dan juga tidak mengalami kelebihan permintaan atas simpanan yang lainnya. Pasar valuta asing pun sepenuhnya berada dalam kondisi keseimbangan apabila tidak ada jenis simpanan yang mengalami kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Oleh karena itulah, teori ini menyimpulkan bahwa pasar valuta asing hanya akan seimbang

(berada dalam kondisi keseimbangan) apabila kondisi paritas suku bunga (*interest parity*) tercipta. Teori PPP didasarkan pada sebuah asumsi implisit tidak ada biaya, transportasi, tarif, atau berbagai kendala lainnya yang menghalangi berlangsungnya arus perdagangan barang dan uang (termasuk investasi) secara bebas. Di samping itu, teori ini juga berpegang pada asumsi semua komoditi dapat diperdagangkan secara internasional, dan tidak ada perubahan struktural dalam bentuk apapun (misalnya perang), yang akan terjadi di masing – masing negara.

b. Versi relatif teori PPP menyatakan perubahan dalam kurs senantiasa proporsional atau sebanding dalam perubahan dalam rasio tingkat – tingkat harga di kedua negara.

2. Pendekatan Moneter Terhadap Pembentukan Kurs dan Lonjakan Kurs

Pendekatan ini mempostulasikan atau menyatakan bahwa kurs tercipta dalam proses penyamaan atau penyeimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang nasional di masing – masing negara.

3. Pendekatan Keseimbangan Portofolio Terhadap Pembentukan Kurs

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan moneter yang mana penekanannya bahwa kurs sesungguhnya terbentuk dalam proses penyamaan dan penyeimbangan stok atau total permintaan dan total penawaran asset – asset finansial dalam setiap negara. Pendekatan keseimbangan portofolio menyatakan kenaikan penawaran uang di negara domestik dan akan mendorong terjadinya kemerosotan suku bunga di negara yang bersangkutan, sehingga akan membuat

para investor menukarkan obligasi domestiknya menjadi mata uang domestik dan obligasi luar negeri. Pendekatan keseimbangan portofolio juga menjelaskan terjadinya lonjakan kurs, namun tidak seperti pendekatan moneter, ia mampu menjelaskannya secara eksplisit dan mengaitkan peran perdagangan dalam proses penyesuaian kurs dalam jangka panjang (Salvatore,1997:44-48).

Kurs yang akan diteliti hubungannya yaitu kurs rupiah Indonesia terhadap dollar Amerika Serikat kaitannya dengan *Gross Domestic Product* (GDP) di Indonesia periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2008. Alasan yang mendasarinya yaitu nilai tukar rupiah termasuk mata uang yang paling *volatile* di antara mata – mata uang negara ASEAN. Hal ini terkait dengan tidak mantapnya (*unsoundness*) fundamental makroekonomi Indonesia, sehingga pergerakan nilai tukar rupiah mudah bergejolak akibat pengaruh mata uang lain, yakni ketidakpastian (*uncertainty*) dalam mata uang rupiah sendiri. Dalam penelitian Nazzamudin diketahui bahwa pertumbuhan GDP dapat menyebabkan apresiasi rupiah(Nazzamudin,2005:1). Sesuai dengan pendekatan moneter, apabila tingkat penawaran uang di Indonesia mengalami kenaikan, suku bunga turun, *capital outflow* bertambah, dan pada akhirnya terjadi depresiasi, daya beli masyarakat meningkat (GDP meningkat). Kemudian, dalam kurun waktu yang cukup panjang, harga mengalami kenaikan yang sehingga rupiah mengalami apresiasi yang kemudian menghilangkan kelebihan depresiasi(Salvatore,1997:47).